

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 18 TAHUN 2016 TERHADAP JAMINAN
PERLINDUNGAN ATAS RISIKO PENANGKAPAN IKAN PERSPEKTIF
FIQH SIYĀSAH
(Studi Kasus Tempat Pelelangan Ikan Brondong Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh
Kavita Trisnamurty Dewi
NIM. 05020420035



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kavita Trisnamurty Dewi
NIM : 05020420035
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 Terhadap Jaminan Perlindungan Atas Risiko Penangkapan Ikan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Tempat Pelelangan Ikan Brondong Lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 November 2023
Saya yang menyatakan,



Kavita Trisnamurty Dewi
NIM. 05020420035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

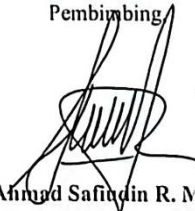
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Kavita Trisnamurty Dewi
NIM. : 05020420035
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016
Terhadap Jaminan Perlindungan Atas Risiko
Penangkapan Ikan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus
Tempat Pelelangan Ikan Brondong Lamongan)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 November 2023

Pembimbing



Ahmad Safiqin R. M.H
NIP. 199212292019031005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

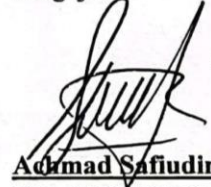
Nama : Kavita Trisnamurty Dewi

NIM. : 05020420035

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

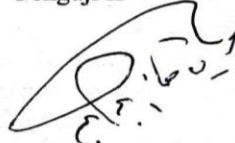
Penguji I



Achmad Safiudin R., M.H.

NIP. 199212292019031005

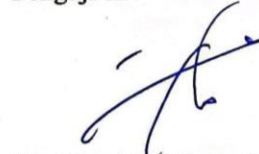
Penguji II



Dr. H. Suis, M.Fil.I.

NIP. 196201011997031002

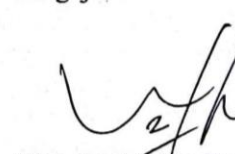
Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.

NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I. M.H.

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 12 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 198203271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kavita Trisnamurty Dewi
NIM : 05020420035
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : 05020420035@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 Terhadap Jaminan Perlindungan Atas Risiko Penangkapan Ikan Perspektif *Fiqh Siyâsah* (Studi Kasus Tempat Pelelangan Ikan Brondong Lamongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Januari 2024

Penulis

Kavita Trisnamurty Dewi

ABSTRAK

Menjadi seorang nelayan memiliki risiko tinggi, seperti fluktuasi cuaca yang ekstrem, gelombang tinggi, dan potensi kejadian berbahaya di laut yang mengakibatkan hasil dari melaut tidak menentu serta taruhannya nyawa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada para nelayan dengan memberikan jaminan keselamatan yang dapat melindungi mereka. Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 Terhadap Jaminan Perlindungan Atas Risiko Penangkapan Ikan Perspektif *Fiqh Siyâsah* (Studi Kasus Tempat Pelelangan Ikan Brondong Lamongan)”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 terhadap jaminan perlindungan atas risiko penangkapan ikan di TPI Brondong Lamongan dan bagaimana tinjauan *fiqh siyâsah* terhadap implementasi jaminan perlindungan atas risiko penangkapan ikan di TPI Brondong Lamongan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi (data) untuk membahas permasalahan dengan menggunakan kaidah hukum dan kajian literatur yang terkait dengan topik pembahasan. Data yang diperoleh kemudian direduksi dan disajikan dengan deskriptif analisis dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 dan dari pandangan *fiqh siyâsah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program jaminan perlindungan atas risiko penangkapan ikan terhadap masyarakat nelayan TPI Brondong belum terlaksanakan dengan optimal. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat antara lain kurangnya sosialisasi dan pembinaan, dana APBN, kurangnya evaluasi dalam Dinas Perikanan Lamongan, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat nelayan Brondong, dan luasnya wilayah. Sedangkan dari perspektif *fiqh siyâsah*, penelitian ini fokus pada bidang *fiqh siyâsah tanfidziyyah* yang merujuk pada konsep *ul al-amr*. Dalam penelitian ini yang disebut *ulil amri* adalah Dinas perikanan Lamongan, merupakan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan yang melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu memberikan jaminan perlindungan atas risiko penangkapan ikan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016. Sebagai *ulil amri*, lembaga ini dalam menjalankan tugasnya harus mampu menerapkan prinsip-prinsip utama yaitu prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, dan prinsip amanah dalam struktur pemerintahannya. Selain itu, apabila terdapat permasalahan terhadap jalannya program ini maka harus melakukan adanya musyawarah. Hal ini berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah demi kemaslahatan masyarakat nelayan TPI Brondong.

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan di atas, penulis berharap agar Dinas Perikanan Lamongan mengadakan sosialisasi setidaknya satu bulan sekali. Sosialisasi ini bertujuan untuk memantau kondisi dan memberikan pemahaman kepada nelayan di TPI Brondong mengenai pelaksanaan Program Jaminan Perlindungan melalui asuransi yang dinaungi oleh BPJS Ketenagakerjaan Lamongan dan rukun nelayan Brondong, Perlunya evaluasi dari Dinas Perikanan Lamongan, serta menerapkan prinsip tanggung jawab, adil serta amanah sesuai perspektif *fiqh siyâsah*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
A. Konsonan	xiii
B. Vokal.....	xiv
C. <i>Tā' Marbūṭah</i>	xv
D. Penulisan Huruf Kapital.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II	24
KONSEP UMUM <i>FIQH SIYĀSAH</i> DAN PERLINDUNGAN HUKUM	24
A. <i>Fiqh Siyâsah</i>	24
1. Pengertian <i>Fiqh Siyâsah</i>	24
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyâsah</i>	27
3. <i>Siyâsah Dusturiyah</i>	29
4. Meningkatkan Kesejahteraan Menurut <i>Fiqh Siyâsah</i>	31
B. Konsep Perlindungan Hukum	34

1. Pengertian Perlindungan Hukum	34
2. Konsep Perlindungan Hukum	37
3. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum Di Indonesia.....	39
4. Adanya Kepastian Hukum.....	40
C. Perlindungan Hukum Bagi Nelayan	41
1. Pengertian Nelayan.....	41
2. Jenis-Jenis Nelayan.....	43
3. Kebijakan Perlindungan Nelayan	44
4. Jaminan Perlindungan Atas Risiko Penangkapan Ikan	47
BAB III	49
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN	
PERIKANAN NOMOR 18 TAHUN 2016 TERHADAP JAMINAN	
PERLINDUNGAN ATAS RISIKO PENANGKAPAN IKAN DI TPI	
BRONDONG LAMONGAN	49
A. Ruang Lingkup Keadaan Masyarakat Nelayan di TPI Brondong.....	49
B. Pelaksanaan Jaminan Perlindungan Atas Risiko Penangkapan Ikan	
Terhadap Nelayan di TPI Brondong Berdasarkan Peraturan Menteri	
Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016	61
BAB IV.....	74
ANALISIS FIQH SIYÂSAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN	
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 18 TAHUN 2016	
TENTANG JAMINAN PERLINDUNGAN ATAS RISIKO PENANGKAPAN	
IKAN DI TPI BRONDONG LAMONGAN.....	74
A. Analisis Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan	
Nomor 18 Tahun 2016 Terhadap Jaminan Perlindungan Atas Risiko	
Penangkapan Ikan di TPI Brondong Lamongan	74
B. Analisis Fiqh Siyâsah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri	
Nomor 18 Tahun 2016 Terhadap Jaminan Perlindungan Atas Risiko	
Penangkapan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Brondong Lamongan	90
BAB V	97
PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah kapal Nelayan di TPI Brondong	52
Tabel 2 Struktural Kepengurusan Nelayan Brondong	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kapal Nelayan TPI Brondong	107
Gambar 2 ketua rukun nelayan Brondong (Bapak Mugiyanto).....	108
Gambar 3 Dinas Perikanan Lamongan (Bapak Hendro).....	108
Gambar 4 Wakil ketua paguyuban nelayan kecil (Bapak Ridwan).....	109
Gambar 5 Nelayan buruh (Bapak Toni)	109



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Dudung. "Musyawarah Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)" 3, no. 2 (2014).
- Andika Wijaya. *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. 1. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Bagir Manan. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014.
- H. A. Djazuli. *Fiqh Siyâsah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Imam al-Mawardi and Al-Ahkam as-Shutaniyah. *Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syariat Islam*. Bekasi: PT. Darul Falah, 2006.
- J. Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyâsah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Wali Pers, 1993.
- Manadiyanto Sastra Wijaya. *Nelayan Nusantara*. Jakarta: Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PRPPSE), Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP), 2002.
- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Rosjidi Ranggawidjaja. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Setiono. *Disertasi Rule Of Law*. Surakarta: Magister Ilmu hukum Program Pascasarjana Universitas 11 maret, 2004.
- Syamsul Arifin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press, 2012.
- Wahbah az-Zuhayli. *Ushul Al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Daral-Fikr, 2010.

B. Karya Tulis Ilmiah

- Abidin As, Zaenal. "Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang." *Jurnal Caraka Prabu* 1, no. 2 (April 5, 2019): 84–122. <https://doi.org/10.36859/jcp.v1i2.95>.
- Ainun Fadilah. "Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Sebagai Peserta Asuransi Perikanan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja (Studi PT Asuransi Ramayana Medan)." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, 2022.
- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 1 (March 15, 2012): 1. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>.

- Annysa Khirima. “Peran Pemerintah Melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Program Kampung Perikanan Budidaya Di Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Fiqh Siyâsah.” *UIN Suska Riau*, 2023.
- Ardian Nur. “Analisis Fiqh Siyâsah Terhadap Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat Dalam Meningkatkan Penghasilan Nelayan Tradisional Di Kecamatan Pesisir Tengah.” *UIN Raden Intan Lampung*, 2020.
- Asrul Salim Tanjung. “Jaminan Kecelakaan Kerja Nelayan Buruh Melalui Asuransi Perikanan (Studi Kasus Desa Tanjung Luar).” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2021.
- Irpan Romanda. “Tinjauan Fiqh Siyâsah Terhadap Peraturan Menteri Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*).” *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020.
- Kalvin Oktavianus Karanda, Fanley N. Pangemanan, and Neni Kumayas. “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Inobonto Dua Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow.” *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022).
- Khoirima, Annysa. “Peran Pemerintah Melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Program Kampung Perikanan Budidaya Di Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Fiqh Siyâsah.” *UIN suska Riau*, 2023.
- Mas Budi. “Tinjauan Fiqh Siyâsah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Menegakkan Uud 1945 Pasal 28d Ayat (1) Tentang Perlakuan Yang Sama Di Hadapan Hukum (Studi Kasus Di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).” *UIN Raden Intan Lampung*, 2022.
- Meli Khairani. “Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat).” *Skripsi Universitas Teuku Umar*, 2022.
- Muhammad Afandi. “Pelaksanaan Asuransi Jiwa Terhadap Nelayan Di Kecamatan Banten Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam.” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2018.

- Muhammad Ghiffari Andrista. “Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam.” *Universitas Lampung*, 2022.
- Putri Diah Pengestika. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Medan.” *Universitas Medan Area*, 2018.
- Rakhmawati, Julia, and Yuliani Setyaningsih. “Apakah Unsafe Action Dan Unsafe Condition Berpengaruh Terhadap Kecelakaan Nelayan?” 14, no. 1 (2022).
- Ramdayanti, Elvira, Gilli Argenti, and Prilla Marsingga. “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 6, no. 2 (December 1, 2021): 194–201. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1895>.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Soemarmi, Amiek, and Amalia Diamantina. “Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (July 31, 2019): 241. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248>.
- Tanjung, Asrul Salim. “Jaminan Kecelakaan Kerja Nelayan Buruh Melalui Asuransi Perikanan (Studi Kasus Desa Tanjung Luar).” *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2021.
- Yazidda, Novicara Nur. “Menelisik Makna Pendapatan Dalam Perspektif Nelayan (Studi Fenomenologi pada Nelayan Desa Banjaranyar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2022.

C. Internet

- Apa Itu Fiqih Dari Perkembangan Dan Apa Saja Sumbernya. Accessed October 18, 2023. <https://www.gemarisalah.com/apa-itu-fiqih/>.
- Arti Kata Perlindungan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Accessed October 13, 2023. <https://kbbi.web.id/perlindungan>.
- Brondong, Lamongan. In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, July 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Brondong,_Lamongan&oldid=23919493.

- Database Peraturan JDIH BPK. “Permen KKP No. 18/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016.” Accessed November 9, 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/158543/permen-kkp-no-18permen-kp2016-tahun-2016>.
- Hukum, Pinter. “Pandangan Lawrence M Fiedman Tentang 3 Komponen Dalam Sistem Hukum - pinterhukum,” June 17, 2022. <https://pinterhukum.or.id/pandangan-lawrence-m-fiedman-tentang-3-komponen-dalam-sistem-hukum/>.
- Kecamatan Brondong, Tentang Kami. Accessed November 3, 2023. <https://www.lamongankab.go.id/beranda/brondong/about-me>.
- Kemenag. “Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab kepada Rakyatnya.” <https://kemenag.go.id>. Accessed November 11, 2023. <https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya-P4VBw>.
- Kuliah, Referensi. “Perlindungan Hukum Adalah, Definisi / Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.” Wislah.com - Pusat Referensi Pilihan, September 11, 2021. <https://wislah.com/perlindungan-hukum/>.
- Surat Al-Ma’idah Ayat 8 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb. Accessed November 11, 2023. <https://tafsirweb.com/1892-surat-al-maidah-ayat-8.html>.
- Tafsir AlQuran Online. “Surat Al-Anfal Ayat 27.” Accessed November 11, 2023. <https://tafsirq.com/permalink/ayat/1187>.
- Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong - Tabloid Mata Hati. Accessed November 3, 2023. <https://tabloidmatahati.com/tempat-pelelangan-ikan-tpi-brondong/>.

D. Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam.